

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LDNU

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya

dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skipturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan

Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Asas Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
 - b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan trampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustad'l'afin).
 - d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairul Ummah.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.¹

¹ Diambil dari www.pwnujatim.or.id dan diakses pada tanggal 11 Juni 2106

2. Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama adalah:

a. Badan otonom

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Badan otonom yang dimaksud yaitu:

- 1) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

 - (a) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
 - (b) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
 - (c) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.

(d) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(e) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(f) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

2) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

(a) Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.

(b) Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.

(c) Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

- (d) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
 - (e) Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
 - (f) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru atau ustadz.
 - (g) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
 - (h) Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.²

b. Lajnah

Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Ada beberapa bagian dari Lajnah, yaitu:

1. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.

² Tim Revisi POA, *Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jawa Timur*, (Surabaya: Lajnah PWNU, 2013), hal: 65

2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab / buku serta media informasi menurut faham Ahlusunnah wal Jamaah.
 3. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.³

c. Lembaga

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

- 1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
 - 2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
 - 3) Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama

³ Tim Revisi POA, *Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jawa Timur*, (Surabaya: Lajnah PWNU, 2013), hal: 64

dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

- 4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
- 5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
- 6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
- 7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
- 9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan

kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya.

- 10) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
 - 11) Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
 - 12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - 13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
 - 14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
 - 15) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
 - 16) Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan

penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah.

- 17) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

18) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.⁴

Menurut Bapak Sumarkhan selaku ketua LDNU Jawa Timur, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mempunyai visi misi menjalankan misi dakwah aswaja yang diamanatkan oleh para kyai NU. NU sendiri awal terbentuk misi utamanya adalah berdakwah. Setelah dakwah NU berkembang barulah dibentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. LDNU merupakan corong atau tunas NU di bidang Dakwah. Tahun berdiri LDNU belum diketahui secara pasti, namun pendirian lembaga ini tidak jauh dengan awal mula berdirinya NU itu sendiri. Tugas dari LDNU adalah melaksanakan misi dakwah PWNU dan mempunyai wewenang berdakwah sesuai dengan program kerja yang dibuat oleh anggota LDNU dengan persetujuan PWNU.

⁴ Tim Revisi POA, *Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jawa Timur*, (Surabaya: Lajnah PWNU, 2013), hal: 63

Gambar 4.1

Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama



3. Visi, Misi, Makna Lambang dan Tujuan Berdirinya

a. Visi dan Misi

(1) Visi

Berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

(2) Misi

(a) Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.

- (b) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan trampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
 - (c) Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin).
 - (d) Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
 - (e) Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairul Ummah.⁵

b. Makna Lambang

Lambang adalah lambang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri. Atribut adalah

⁵ Diambil dari www.pwnujatim.or.id dan diakses pada tanggal 11 Juni 2106

sarana yang bisa ditempati/ditempel lambing Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang diperuntukkan dengan maksud tertentu. Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagaimana yang ditentukan dalam pedoman ini.

Lambang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul; disekelilingi oleh 9 (Sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkar atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) diantaranya terbesar terletak ditengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa. Lambang sebagaimana dimaksud dicetak dengan warna putih di atas warna dasar hijau.

Lambang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama sebagaimana dirincikan di atas merupakan identitas resmi organisasi yang ada dalam atribut-atribut organisasi seperti:

- 1) Bendera
- 2) Stempel
- 3) Kop Surat / Amplop
- 4) Papan Nama
- 5) Duaja / Panji-panji
- 6) Lencana
- 7) Baju Seragam

- 8) Dan atribut lain.

Gambar 4.2

Lambang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama



c. Tujuan LDNU

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.

4. Program Kerja LDNU

Tabel 4.1 **Program Kerja Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama**

PROGRAM KERJA PW.LDNU JAWA TIMUR PERIODE 2013 - 2018					
PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	WAKTU	PELAKSANA	SUMBER DANA
Peningkatan SDM PW.LDNU & PC.LDNU Jatim	1. Raker PW-LDNU JATIM	Seluruh Pengurus LDNU Periode 2013-2018	Minggu-2 Oktober 2013	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM
	2. RAKOR PW dan PC LDNU JATIM	PW dan PC LDNU JATIM	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM dan Sponsorship
	3. Pengiriman delegasi ke forum ilmiah seperti seminar, workshop dan lokakarya	Pengurus PW.LDNU JATIM	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM
	4. Istighasah rutin / Bulan	Seluruh pengurus PWNU, Lembaga, Lajnah dan BANOM serta Jamaah Yasin Tahlil di sekitar Kota Surabaya dan	Setiap Sabtu Legi / Bulan	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM dan sponsorship
Penguatan & pemantapan aqidah, faham serta amaliyah ASWAJA					

		Sidoarjo			
	5. Pengiriman Khotib Jumat, Idul Fitri & Idul Adha ke Masjid-masjid	Masid-masjid di seluruh JATIM	Kondisional	PW.LDNU JATIM	DONATUR
	6. Pengiriman da'i / da'iyah pembangun	Kawasan & daerah tertinggal aspek pembangunan keagaamannya di Provinsi JATIM	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & Pemprov JATIM
	7. Pengiriman da'i / da'iyah ke media elektronik	Media elektronik	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM dan sponsorship
	8. Pengiriman da'i keluar Jawa	Masyarakat yang masih lemah dari sisi aqidah dan faham ASWAJANYA	Kondisional	PW.LDNU JATIM kerjasama dengan Pemprov JATIM	PW.LDNU JATIM & Pemprov JATIM
	9. KISWAH	Seluruh pengurus PWNU, Lembaga / Lajnah dan BANOM serta Jamaah Yasin Tahlil di sekitar Kota Surabaya	Minggu-3 / Bulan	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & Pemprov JATIM

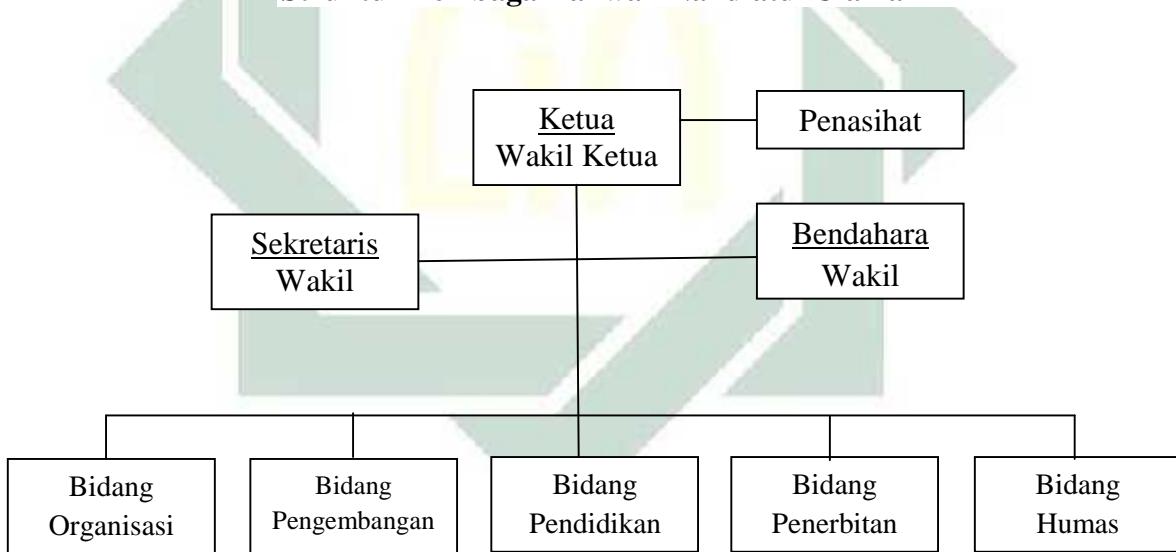
		dan Sidoarjo			
	10. Bengkel keluarga sakinah	Warga Nahdliyyin wilayah Surabaya, Sidoarjo, gresik, dan sekitarnya.	Setiap Rabu malam	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & sponsorship
	11. Pendamping an dan pembinaan mental dan rohani masyarakat sekitar lokalisasi Dolly	Masyarakat sekitar lokalisasi Dolly	Juni 2013 – Desember 2014	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & Pemkot Surabaya
	12. Pengiriman da'I penyuluhan	Masyarakat yang masih lemah dari sisi aqidah dan faham & amaliyah ASWAJA-nya	Januari – Desember setiap tahun	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & Kemenag JATIM
	13. Pencetakan dan penyebaran buku ASWAJA	Seluruh PC.LDNU se JATIM dan PONPES yang ditunjuk	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & sponsorship
Pengembangan dan penyebaran dakwah ASWAJA yang santun dan menyegarkan	14. Pengiriman da'I / da'iyyah ke Hongkong	Da'I / da'iyyah PC.NU & PW.NU se-Jatim	Kondisional	PW.LDNU JATIM	PW.LDNU JATIM & Pemprov JATIM
	15. Semiloka “Revitalisasi dakwah Islam	Pengurus PC.NU & PW.NU se-Jatim	Kondisional	PW.LDNU JATIM	Sponsorship

	Rahmatan Lil Alamin (ASWAJA)				
16.	Seminar kebangsaan “Mencari Titik Temu & Jalan Tengah Konflik Syiah-Sunni	Pengurus PC.NU & PW.NU serta Ulama se- Jatim	Kondisio nal	PW.LDNU JATIM	Pemprov JATIM

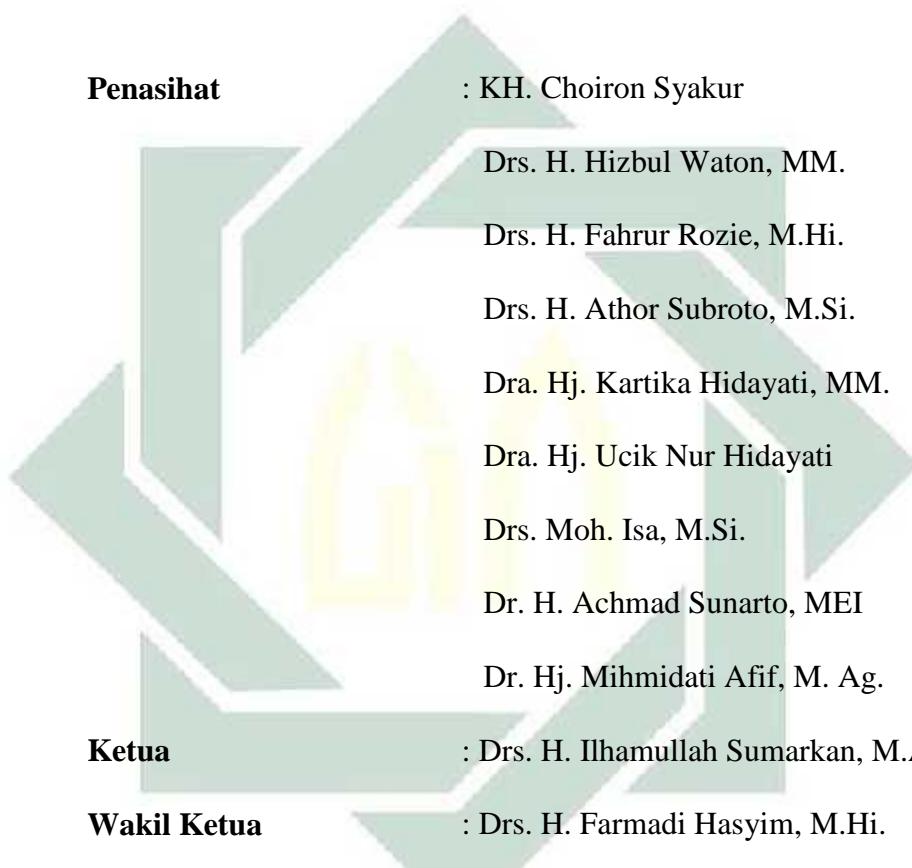
5. Struktur Organisasi

Gambar 4.3

Struktur Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama



SUSUNAN PENGURUS
**PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL
ULAMA JAWA TIMUR**
MASA KHIDMAT 2013-2018



Ketua

: Drs. H. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag.

Wakil Ketua

: Drs. H. Farmadi Hasyim, M.Hi.

Drs. KH. Syukron Jazilan, M.Ag.

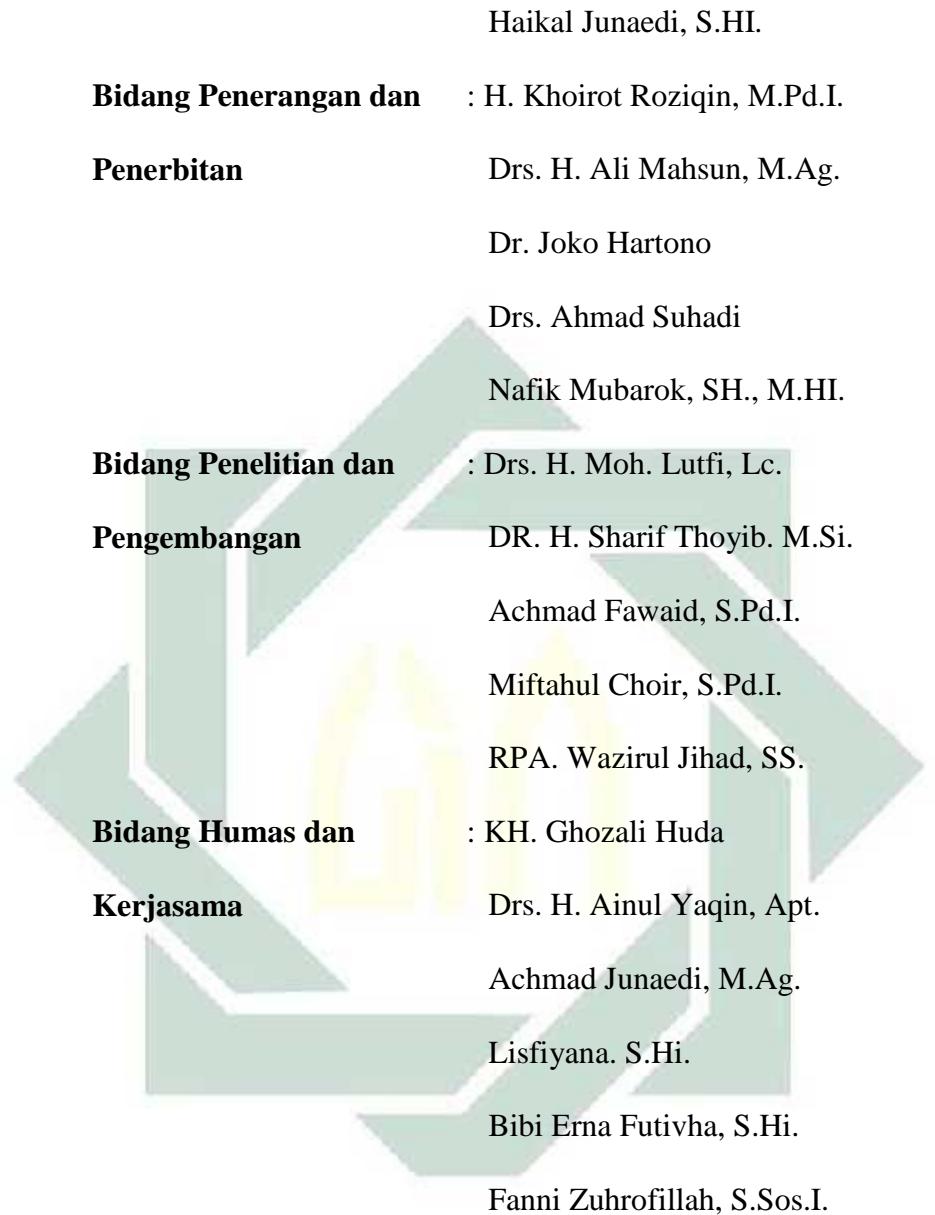
Drs. H. Moh. Ersyad, M.Hi.

H. Asyik Ismoyo, M.Si.

Drs. H. Abdul Haris, M.

Mahir Amin S Ag M Fil I

	Drs. H. Nurhasan
	DR. H. Moh. Toha, M.Ag.
Sekretaris	: Ach. Syauqi Amin, M.Hi.
Wakil Sekretaris	: Muhlis Amal, s.Ag., M.Pd.I.
	Nur Cholis, M.Hi.
	Mufaizah, M.Pd.I.
	Abdul wasid, M.Fil.I.
Bendahara	: Drs. H. Hasan Baisuni, M.Si.
Wakil Bendahara	: H. Abdul Munif, M.Si.
	H. Moh. Nuh
	Drs. H. Agus Tohir, M.Si.
	H. Moch. Imron, HZ., SH.
Bidang-Bidang	:
Bidang Organisasi	: Drs. H. Marfai'I Shobar
	Drs. H. Chabib Manan
	H. Moh. Farchan, SE.
	H. Muzammil
Bidang Pendidikan dan	: Drs. Abdullah Satar, M.Ag.
Kaderisasi	Syaiful Rahman, M.HI.
	Miftachul Choir Masyhuri, M.Pd.I.
	Bahtiar, S.Hi.



B. Penyajian Data

Dalam dunia kerja baik itu non profit atau profit pasti mempunyai kriteria khusus untuk mempunyai anggota/katyawan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota ini sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya suatu tujuan. Tidak semua orang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Hanya orang-orang yang mempunyai tanggungjawab besar yang mampu bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, LDNU mempunyai standart untuk memilih atau mencari seorang anggota. Ini seperti yang diungkapkan oleh sekretaris LDNU sendiri.

Tim pembantu, jadi gini toh, di ldnu setiap 4 tahun sekali ada pemilihan pengurus baru di pwnu, namanya pengurus wilayah (PW) singkatnya pw, nah ketika terpilih ketuanya itu, nanti dibuatlah tim formatur, tim yang tugasnya menyusun kepengurusan. Nanti ada usulan-usulan, nanti diseleksi sama tim. Siapa yang menjadi ketua dibidang ini gitu... fdan untuk pengurus di ldnunya sendiri, nanti yang usulkan ketua, sekretaris nanti sama ke bawah itu ketua yang mengusulkan, jadi tim formatur itu hanya, hanya menentukan ketua. Ya jelasnya apa kriterianya itu pernah aktif di pwnu beberapa tahun, kemampuan dibidang itu bagaimana, dibidang yang akan diraih, tanggung jawabnya, jadi itu pasti aspeknya itu aspek pertimbangannya itu pertama aspek kapabilitas, kemampuan dibidang yang akan diserahi tanggung jawab, yang kedua adalah pertimbangan pengorganisasian, apakah dia pernah aktif di NU, sampai tingkat mana, kan nu ada tingkatan sampai ranting-ranting itu desa,⁶

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

PWNU adalah tingkatan atas dari LDNU. Pemilihan ketua LDNU ditentukan oleh tim dari PWNU. PWNU sendiri mempunyai standart untuk memilih ketua LDNU. Untuk memilih ketua LDNU, PWNU membuat tim yang diberi nama tim formatur. Tim formatur ini mempunyai tugas menyusun kepengurusan PWNU. Orang yang terpilih menjadi ketua di bawah naungan PWNU sudah benar-benar ahli dalam bidangnya. Untuk menjadi anggota LDNU setidaknya sudah aktif di organisasi NU mulai dari tingkat daerah hingga wilayah. Anggota LDNU dipilih langsung oleh ketua LDNU sendiri. Pemilihan ini dilakukan dengan seleksi oleh ketua LDNU. Setelah ketua LDNU memilih anggotanya, kemudian usul keanggotaan diserahkan kepada tim PWNU untuk disetujui. Ini dipertegas oleh Ketua LDNU.

kalau untuk ketua itu langsung ditentukan oleh ketua PWNU, lalu kemudian untuk kelengkapan..... LDNU itu kami menyusun dan kita usulkan ke PWNU. Disetujui yaa itu yang di SKKP .yaa kita punya pertimbangan bahwa mereka-mereka yang masuk itu di LDNU itu adalah orang-orang yang menekuni di bidang dakwah yang punya skill di bidang dakwah disamping itu punya kelebihan di bidang tulis menulis di bidang administrasi, di bidang computer yaa itu juga nanti itu. Misalya yaa rata-rata semua bisa dakwah dengan ceramah, dengan mauidlhoh itu.⁷

Ketua LDNU mempunyai criteria khusus untuk membentuk anggotanya. Anggota LDNU yang terpilih harus mampu setidaknya

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

berdakwah. Dan untuk kemampuan tambahan seperti keahlian mengoperasikan Komputer juga menjadi penunjang dalam bidang administrasi.

Ketua LDNU periode 2013-2018 sudah aktif lebih dari 10 tahun. Jadi sudah sah untuk menjadi pengurus wilayah. Sebelumnya ketua LDNU sudah aktif menjadi anggota dibidang lain seperti LAZIZNU. Dalam pemilihan ketua pengurus wilayah tiap lembaga dipilih oleh PWNU langsung.

“Tim formatur, jadi gini toh, di LDNU setiap 4 tahun sekali ada pemilihan pengurus baru di PWNU, namanya pengurus wilayah (PW), nah ketika terpilih ketuanya itu, nanti dibuatlah tim formatur, tim yang tugasnya menyusun kepengurusan. Nanti ada usulan-usulan, nanti diseleksi sama tim. Siapa yang menjadi ketua dibidang ini gitu... dan untuk pengurus di LDNU-nya sendiri, nanti yang usulkan ketua, sekretaris nanti sama ke bawah itu ketua yang mengusulkan, jadi tim formatur itu hanya menentukan ketua.”⁸

Tim formatur adalah tim yang dibuat untuk memilih ketua tiap lembaga. Tugas dari tim tersebut hanya memilih ketua lembaga. Dan setelah pemilihan ketua LDNU, kepengurusan LDNU belum ada anggota. Anggota LDNU dipilih oleh ketua LDNU sendiri.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Semua anggota LDNU yang dipilih oleh ketua sudah dipertimbangkan dengan matang, mulai dari skill berdakwah, menulis hingga dibidang computer untuk administrasi.

Untuk menambah kemampuan anggota, setiap lembaga pasti mempunyai program kerja pelatihan berupa workshop. Ini sesuai dengan program kerja yang diadakan oleh LDNU. Program kerja sudah dijelaskan pada penjelasan gambaran umum. Pelatihan dan pembinaan dilakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Pemprov, kemenag dan lain-lain. Ini dibenarkan oleh ketua LDNU.

“iya pembinaan dalam dai dan kader, bisa juga berkerjasama dengan lembaga2 formal seperti dengan pemprov,, bentuk terkait dengan supporting kegiatan itu diantaranya kegiatan pemprov atau anggaran pemprov untuk di sumbangkan ke kegiatan lembaga dakwah ini. Termasuk juga dengan pemerintah dalam negeri”⁹

Anggota di LDNU, selain ada pengurus harian juga ada bidang-bidang yang membantu dalam kegiatan organisasi. Untuk membagi kegiatan-kegiatan dakwah perlu adanya departemen-departemen atau divisi-devisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Di LDNU sendiri pengelompokan kerja dibagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada beberapa departemen atau devisi yang ada di LDNU. Yaitu: bidang organisasi, bidang

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

pendidikan dan kaderisasi, bidang penerangan dan penerbitan, bidang penelitian dan pengembangan serta bidang humas dan kerjasama. Dan juga ada pengurus harian seperti ketua, sekretaris dan bendahara.

“iya kan tadi ada bidang-bidang itu. Nanti ada bidang humas, bidang pendanaan mencari dana, ada bidang skretariat, kan gitu toh?? Yaa mereka masing-masing. Yaa Cuma dalam satu pekerjaan yang besar lalu kita akan membentuk kepanitiaan sendiri lagi untuk bisa bekerja sesuai dengan tugasnya.”¹⁰

Semua bidang-bidang itu nantinya mempunyai tugas untuk membuat program kerja yang akan dirapatkan pada rapat pleno. Program yang sudah ada di tiap bidang nanti diusulkan tiap rapat dan program tersebut dipertimbangkan kembali.

“Ya bidang itu sudah.. nanti biasanya tiap bidang eee nanti ada reker.. nah di raker itu nanti setiap bidang disuruh buat program kerja gitu, nah itu buat acuan program Idnu disitu, setiap bidangnya saya gak hafal, program kerja nanti jadi satu mana yang dijadikan program kerja atau enggak, kalo raker itu biasanya ada rapat komisi, semua masing-masing bidang ngumpul sama bidangnya untuk bahas programnya, setelah itu rapat pleno, pleno itu semua bidang ngumpul semua, mempresentasikan apa saja yang akan diusulkan program kerjanya. Nanti membuat tim, mana yang perlu dirubah / diganti, lebih-lebih kemudian disinkronkan dengan bidang-bidang yang lain.”¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Setalah pengelompokan kerja kemudian membuat rencana kerja. Setiap departemen mempunyak tanggungjawab penuh atas rencana kerja yang sudah dibuatnya. Tiap departemen harus saling mengkoordinasi setiap ada tugas dalam organisasi dakwah ini.

Manfaat dari pengelompokan kerja ini adalah untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Semua sudah mempunya jobdesk masing-masing sehingga tujuan jelas dicapai dan tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Anggota harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang sehingga tidak focus terhadap apa yang menjadinya tugasnya.

“Manfaatnya itu, ya... itu.. untuk mempermudah pekerjaan, untuk mempermudah pelaksanaan program LDNU, jadi nanti itu setelah ditentukan ini bidang ini, kan nanti ditentukan seperti itu. Bidang dakwah misalnya.. bidang dakwah ini programnya apa saja. Dan itu kapan, yang pertama itu kapan, nanti kemudian pertahun.. pertahun itu ada evaluasi, ada rapat evaluasi. Nah itu nanti di evaluasi mana program yang enggak jalan dan kenapa bisa enggak jalan nanti kemudian dicari solusi bareng-bareng, gimana solusinya..”¹²

Untuk menjadikan organisasi dapat terorganisir dengan baik maka diperlukan komunikasi yang baik juga. Peran ketua sangat vital dalam berkomunikasi. Ketua harus tau situasi dan kondisi para anggotanya.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Komunikasi sangat diperlukan agar tidak ada kesalah pahaman. Komunikasi dilakukan agar mendapatkan sebuah informasi.

“yaa kita mengomandonya melalui bentuk rapat2 undangan pertemuan yaa walaupun tidak harus rutin sesuai dengan jadwal itu. Jadi kita undang lalu yg mengundang itu tidak langsung saya tapi melalui skretaris, melalui bagian2 humas tadi itu.”¹³

Ketua mengomando bawahan pada saat rapat kerja melalui sekretaris untuk membuat surat kemudian diadakan rapat. Dengan kesibukan masing-masing anggota, rapat biasanya dadakan hari sabtu. Karena pada hari sabtu kegiatan anggota hanya pada LDNU.

“Untuk koordinasinya biasanya kan hari sabtu, jadi untuk rapat itu hari sabtu, di hari libur kerja, pokoknya di luar hari kerja, kecuali hal-hal yang sangat mendesak meskipun hari kerja dan waktu sama-sama bisa baru rapat, diluar itu yang pasti hari sabtu rapatnya. Termasuk kegiatan-kegiatan itu hari sabtu. Apalagi kegiatan yang melibatkan cabang-cabang ya pasti sabtu minggu, karena apa, karena kan semua kerja, dicari hari yang kira-kira orang itu bisa semua ya sabtu minggu itu”¹⁴

Dan koordinasi yang dilakukan dibenarkan oleh bapak Saoki. Bahwa koordinasi atau komunikasi yang dilakukan di LDNU diadakan hari Sabtu.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Tidak hanya dengan rapat, komunikasi yang dilakukan juga melalui undangan tertulis, sms, telpon atau bisa dengan bertatap muka secara langsung.

“yaa itu tadi kan kita bisa berkomunikasi melalui formal (undangan tertulis), melalui sms atau telepon atau ketemu langsung untuk mengadakan kegiatan atau untuk membicarakan tentang kegiatan.”¹⁵

Tidak hanya dengan undangan secara formal. Komunikasi yang dilakukan kadang juga bersifat nonformal seperti sms, telpon dan lain-lain. Komunikasi antar link tidak ada batasan. Artinya ketua langsung bisa berinterksi dengan anggota bagian tanpa ada perantara koordinator bagian. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan selaku ketua LDNU.

“Langsung komunikasi, tidak terlalu formal, komunikasinya ya fleksibel tidak kaku. gak ada yaa sudah langsung. Cumin kalau mau ngundang yaa biasanya sudah di bicarakan kepada skretariat untuk mengundang ketika ada pertemuan itu. Jadi tidak terlalu formal”.¹⁶

Dan bapak sauki juga menambahkan dan menegaskan bahwa komuniksi yang ada di LDNU memang fleksibel dan tidak kaku.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

“Bisa gakpapa, artinya kalo memang itu dianggap perlu yawes sesuai keperluan, kalo memang itu ketua memang butuh langsung ke bawahannya ya langsung kalo tidak perlu cukup dengan sekretaris ya sekretaris . artinya fleksibel sifatnya tidak kaku tidak, sesuai dengan mana yang lebih enak, lebih cocok, dan lebih mana yang supaya cepet jalan program itu, gak kaku intinya, fkesibel.”¹⁷

Fleksibel artinya tidak ada batasan untuk komunikasi. Ketua dan anggota bagian bisa saling komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bersifat formal dengan surat melalui sekretaris dan nonformal dengan *Whatsapp*, sms dan telepon.

C. Analisa Data

Pengorganisasi adalah suatu proses dan rangkaian aktivitas dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka dan pemberian iklim dan fasilitas yang wajar, sehingga mereka bekerja secara efisien.¹⁸ Setiap organisasi pasti ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat pekerjaan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁸ Drs. Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 4.

Adapun bentuk-bentuk organisasi dakwah untuk mengetahui jalannya pengorganisasian dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Spesialisasi Kerja (Pembagian Kerja)
 2. Departementalisasi Kerja (Pengelompokan Kerja)
 3. Rantai Komando
 4. Rentang Kendali

Keempat bentuk di atas sudah dijelaskan pada BAB II yang membahas tentang kajian teori. Dan dalam pembahasan di BAB ini, penulis menganalisis keempat teori di atas dengan temuan di lapangan.

Spesialisasi kerja (pembagian kerja) diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah.¹⁹ Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pembagian kerja diperlukan untuk mengetahui tugas masing-masing individu, sehingga pekerjaan berjalan sesuai dengan kemampuannya. Di LDNU juga menerapkan pembagian kerja.

“kalau untuk ketua (LDNU) itu langsung ditentukan oleh ketua PWNU, lalu kemudian untuk kelengkapan (Anggota)..... LDNU itu kami menyusun dan kita usulkan ke PWNU. Disetujui yaa itu yang di SKKP. yaa kita punya pertimbangan bahwa mereka yang masuk itu di LDNU itu adalah orang yang menekuni di bidang dakwah yang punya skill di bidang dakwah disamping itu punya kelebihan di bidang tulis menulis di bidang administrasi, di bidang computer yaa itu juga nanti itu.

¹⁹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), hal. 120

Misalya yaa rata-rata semua bisa dakwah dengan ceramah, dengan mauidlhoh itu.”²⁰

Di LDNU menerapkan pembagian kerja. Pemilihan anggota dilakukan oleh ketua. Anggota dipilih orang-orang yang sudah aktif di Nahdlatul Ulama. Ketua memilih anggota yang sudah ahli di bidangnya. LDNU merupakan wadah untuk berdakwah. Jadi, semua anggota LDNU mempunyai keahlian khusus yaitu berdakwah. Selain berdakwah, anggota juga harus mempunyai kemampuan dibidang administrasi dan computer. Sekretaris harus mampu menguasai kedua bidang itu untuk menunjang tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya.

“Sekretaris? Oohhhh ya anu tugasnya mmm membantu ketua yaa.. dalam hal apa namanya .. manajemen pengorganisasian terutama mengurus di bidang administrasi, surat menyurat kemudian apa... ah pengelolaan organisasi, pokoknya sekretaris itu dibidang administrasi.”²¹

Dengan pembagian kerja, pekerjaan antar individu berbeda. Sebagai sekretaris, bapak Saoki bertugas membantu ketua dalam bidang administrasi. Beliau sudah ahli dan aktif dibidangnya. Beliau juga sudah ahli dalam bidang administrasi dan computer sehingga ketua memilih untuk menjadikan sebagai sekretaris.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Depertementalisasi kerja (pengelompokan kerja) adalah pengelompokan pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama, sehingga dapat dikoordinasikan.²² Pengelompokan kerja dilakukan untuk membagi anggota yang mempunyai kemampuan yang sama dalam sebuah departemen khusus. LDNU ada pengelompokan kerja. Dalam pengelompokan kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian-bagian kerja.

“iya kan tadi ada bidang-bidang itu. Nanti ada bidang humas, bidang pendanaan mencari dana, ada bidang skretariat, kan gitu toh?? Yaa mereka masing-masing. Yaa Cuma dalam satu pekerjaan yg besar lalu kita akan membentuk kepanitiaan sendiri lagi untuk bisa bekerja sesuai dengan tugasnya.”²³

Ada beberapa bidang yang ada di LDNU sesuai dengan strukturnya, yaitu: bidang organisasi, bidang pendidikan dan kaderisasi, bidang penerangan dan penertiban, bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang humas dan kerjasama. Semua bidang tersebut nantinya membuat program kerja yang akan menjadi agenda tahunan LDNU itu sendiri.

“Manfaatnya itu, ya... itu.. untuk mempermudah pekerjaan, untuk mempermudah pelaksanaan program ldnu, jadi nanti itu setelah ditentukan ini bidang ini, kan nanti ditentukan seperti

²² M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), hal. 125

²³ Hasil wawancara dengan bapak Sumarkhan, Rabu 22 Juni 2016, pukul 10.22 WIB, di kantor LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya

itu. Bidang dakwah misalnya.. bidang dakwah ini programnya apa saja. Dan itu kapan, yang pertama itu kapan, nanti kemudian pertahun.. pertahun itu ada evaluasi, ada rapat evaluasi. Nah itu nanti di evaluasi mana program yang enggak jalan dan kenapa bisa enggak jalann nanti kemudian dicari solusi bareng-bareng, gimana solusinya..”²⁴

Manfaat dari pengelompokan kerja ini adalah mempermudah pekerjaan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengelompokan kerja di LDNU sudah dipilih oleh ketua sesuai dengan kemampuan masing-masing individunya.

Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemen masing-masing.²⁵ Koordinasi atau komunikasi yang dilakukan di LDNU tidak ada batasan. Artinya, komunikasi yang dilakukan sifatnya fleksibel atau tidak kaku.

“Bisa gakpapa, artinya kalo memang itu dianggap perlu yawes sesuai keperluan, kalo memang itu ketua memang butuh langsung ke bawahannya ya langsung kalo tidak perlu cukup dengan sekretaris ya sekretaris . artinya fleksibel sifatnya tidak kaku tidak, sesuai dengan mana yang lebih enak, lebih cocok, dan lebih mana yang supaya cepet jalan program itu, gak kaku intinya, fkeksibel.”²⁶

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

²⁵ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), hal. 126

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Saoki, Senin 13 Juni 2016, pukul 19.23 WIB, di ruang dosen Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Komunikasi tidak ada batasan dari tingkat atas hingga bawah ini ada 2 macam yaitu komunikasi formal seperti undangan dan komunikasi nonformal seperti, Whatsapp, sms hingga telpon. Ketua bisa saja berkomunikasi langsung dengan anggota bagian jika itu memang sangat diperlukan. Komunikasi yang dilakukan memang tidak ada batasan dan sifatnya fleksibel.

Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.²⁷ Artinya tiap departementalisasi ada koordinator untuk menyampaikan saran dan pendapat para anggota kepada ketua umum. Istilah di dalam perusahaan adalah supervisor yang mengontrol bawahan dalam departemen yang dipimpin. Dengan komunikasi yang fleksibel, atasan atau ketua bisa mengkoordinasi langsung semua para anggota dan komunikasi tanpa batas yang ada di LDNU. Maka, di LDNU tidak ada rentang kendali.

²⁷ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), hal. 127